

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menuju ke arah kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di masa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan melalui pembangunan, sehingga diharapkan masyarakat dapat memiliki suatu kekuatan untuk menghadapi berbagai krisis ataupun tantangan dan hambatan. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus dapat memberikan suatu pilihan kepada masyarakat. Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kunir tahun 2018-2023 adalah merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kunir untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022.

a. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Kunir menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga

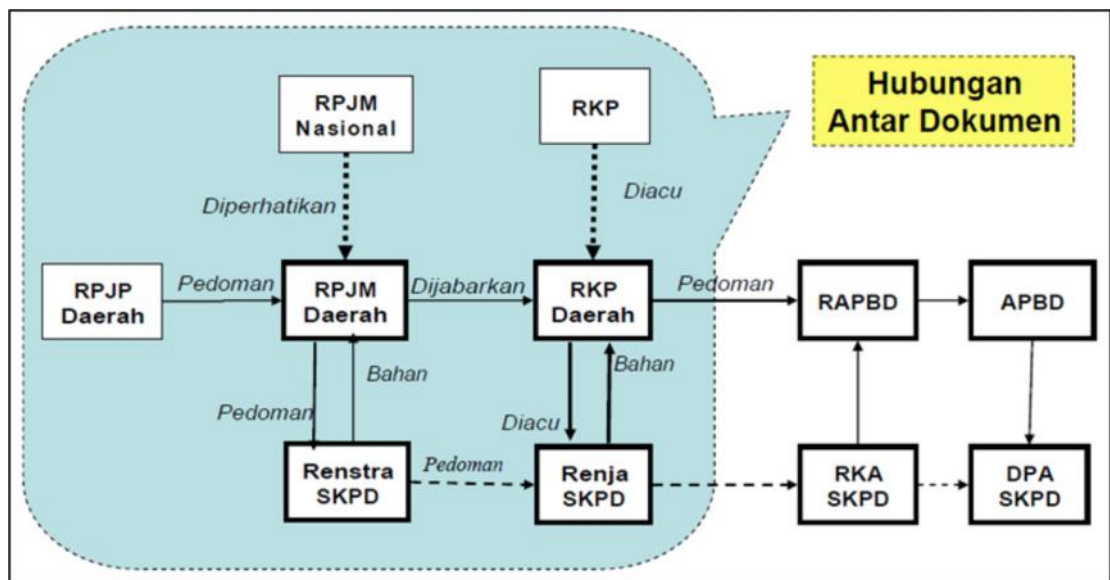
masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

b. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

c. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 merupakan implementasi atas:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman perubahan kegiatan dalam rangka penanggulangan

COVID-19,

11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119 /2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

1.3 Maksud Dan Tujuan :

Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu setahun dengan memperhitungkan segala potensi peluang serta hambatan yang ada atau mungkin timbul. Rancangan Awal Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Kunir Tahun 2022 disusun dengan maksud dan tujuan : sebagai penjabaran dari sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kunir melalui berbagai kegiatan pada Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Awal Renja Kantor Kecamatan Kunir diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

a. Pendahuluan;

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

b. Hasil Evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu;

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022;

c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan

d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah;

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

e. Penutup.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kunir

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2022-2=2020) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang semula direncanakan akan terserap 100% hanya bisa terserap 94%.
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang semula direncanakan akan terserap 100% hanya bisa terserap 97%.
 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang semula direncanakan akan terserap 100% hanya bisa terserap 94%.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan: Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan: -
- d. Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/Kegiatan :
 1. Tiga Program kegiatan diatas merupakan kegiatan rutin yang tidak memuat target kinerja yang sudah ditentukan.
 2. Program yang dapat diukur kongkrit dari 4 program yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan yang dilakukan rutin setiap tahun sehingga kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan rencana kinerja.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Kecamatan Pasrujambe :
 1. Dalam penyajian renstra sudah diukur sesuai dengan target yang terdapat pada program dan kegiatan.
 2. Pelaksanaan renstra sudah disesuaikan dengan schedule bulan pada program dan kegiatan.
- f. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab : -

TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Lumajang

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target Renja Perangk at daerah Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	100%	1.494.728. 593									100%	1.468.173. 593	100%	1.468.173. 593	100%	98%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja	100%	7.260.000									100%	10.565.000	100%	10.565.000	100%	146 %
1	Penyusunan dokumen porencanaan daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 Dok	3.000.000									2 dok	7.260.000	1 dok	7.260.000	1 dok	242 %
2	Koordinasio dan	Jumlah	1 Dok										1 Dok		1 Dok		1 Dok	78%

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target Renja Perangk at daerah Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Realisasi SKPD	dokumen Lakip		1.000.000										775.000		775.000		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	1.300.768. 593									100%	1.288.508. 593	100%	1.288.508. 593	100%	99%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	13 Orang ASN	1.219.468.5 93									13 Orang ASN	1.217.468.5 93	13 Orang ASN	1.217.468. 593	13 Orang ASN	100 %
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 fasilitasi	54.000.000									2 Fasilitasi	45.000.000	2 Fasilitasi	45.000.000	2 Fasilitasi	83%
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengijinan/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausaha an dan verifikasi keuangan SKPD	4 Fasilitasi	23.000.000									4 Fasilitasi	23.000.000	4 Fasilitasi	23.000.000	4 Fasilitasi	100 %

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target Renja Perangk at daerah Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
							Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
4	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi	1 Dok	2.000.000									1 dok	1.500.000	1 dok	1.500.000	1 dok	75%
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun	1 dok	1.000.000									1 dok	620.000	1 dok	620.000	1 dok	62%
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan	1 dok	1.000.000									1 dok	620.000	1 dok	620.000	1 dok	62%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100%	186.700.000									100%	169.100.000	100%	169.100.000	100%	91%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah aktifitas surat menyurat yang difasilitasi	3 Fasilitasi	91.300.000									3 Fasilitasi	83.000.000	3 Fasilitasi	83.000.000	3 Fasilitasi	91%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Jumlah rekening yang	3 rekening	45.100.000									3 Rekening	41.000.000	3 Rekening	41.000.000	3 Rekening	91%

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target Renja Perangk at daerah Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	daya air dan listrik	dibayar																
3	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Jumlah aktivitas administrasi keuangan yang difasilitasi	4 Aktivitas	23.000.000									4 Aktivitas	20.600.000	4 Aktivitas	20.600.000	4 Aktivitas	90%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyedia jasa kebersihan yang dibayar	2 org	3.000.000									2 org	3.000.000	2 org	3.000.000	2 org	100%
5	Penyediaan ATK	Jumlah jenis ATK	24 item	19.000.000									24 item	17.000.000	24 item	17.000.000	24 item	89%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	5.300.000									3 Jenis	4.500.000	3 jenis	4.500.000	3 jenis	85%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik	4 jenisn	2.000.000									4 jenis	2.000.000	4 jenis	2.000.000	4 jenis	100%
4	Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Presentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	115.500.000									100%	93.300.000	100%	93.300.000	100%	81%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan n s/d dengan tahun (n-3) Target Renja Perangk at daerah Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis barang logistik	44 item	21.800.000									44 item	19.900.000	44 item	19.900.000	44 item	91%
2	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	900 org	14.800.000									900 org	14.000.000	900 org	14.000.000	900 org	95%
3	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dalam daerah yang difasilitasi	320 kali	40.500.000									320 kali	40.300.000	320 kali	40.300.000	320 kali	100%
4	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan daerah	Jumlah perjalanan luar daerah yang difasilitasi	20 kali	4.200.000									20 kali	4.00.000	20 kali	4.000.000	20 kali	95%
5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah aktivitas admistrasi perizinan kendaran yang difasilitasi	8 aktivitas	3.000.000									8 aktivitas	3.000.000	8 aktivitas	3.000.000	8 aktivitas	100%
6	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan	Jumlah jenis premi Non PNS	2 jenis	32.000.000									2 jenis	32.000.000	2 jenis	32.000.000	2 jenis	100%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target Renja Perangk at daerah Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)			
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	kesehata PNS	di fasilitasi																		
5	Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan	100%	137.000.000									100%	132.000.000	100%	132.000.000	100%	96%		
1	Rehabilitasi sedang / berat kendaran dinas /operasional	Jumlah kendaran dinas / operasional yang disediakan	8 buah	39.000.000									8 buah	39.000.000	8 buah	39.000000	8 buah	100%		
2	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 rumah	5.000.000									1 rumah	5.000.000	1 rumah	5.000.000	1 rumah	100%		
3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	50.000.000									2 gedung	45.000.000	2 gedung	45.000.000	2 gedung	90%		
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8 buah	39.000.000									8 buah	39.000.000	8 buah	39.000.000	8 buah	100%		
5	Pemeliharaan rutin /	Jumlah	8 buah	4.000.000									8 buah	4.000.000	8 buah	4.000.000	8 buah	100		

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target Renja Perangk at daerah Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan						
							Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	berkala peralatan gedung kantor	peralatan gedung kantor yang dipelihara																	%
6	Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian korpri	Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibeli Jumlah pakaian pakaian korpri yang dibeli	100%	7.000.000									100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	100%	
1	Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	22 stel	7.000.000									22 stel	7.000.000	22 stel	7.000.000	22 stel	100%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase fasilitasi penyelenggara an pemerintahan dan pelyanan publik	100%	60.000.000									100%	49.260.000	100%	49.260.000	100%	82%	
1	Pelaksanaan urusan	Persentase	100%	60.000.000									100%	49.260.000	100%	49.260.000	100%	82%	

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target Renja Perangk at daerah Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021		Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020		Tingkat Realiasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realiasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	memenuhi urusan Pemerintahan yang dilimpahkan																
1	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	100%	2.000.000									100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	75%
2	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan izin usaha berskala kecil	Jumlah izin usaha skala kecil yang diterbitkan	100%	2.000.000									100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	75%
3	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan IMB skala kecil	Jumlah IMB skala kecil yang diterbitkan	100%	2.000.000									100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	75%
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait dengan Non perizinan	Jumlah dokumen administrasi non perizinan yang diterbitkan	100%	2.000000									100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	75%

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target Renja Perangk at daerah Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
							Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
5	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah dokumen kependudukan yang di fasilitasi	100%	50.000.000									100%	41.760.000	100%	41.760.000	100%	84%
6	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan	Jumlah urusan Pemerintahan terkait pelimpahan kewenangan yang di fasilitasi	100%	2.000.000									100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	75%
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	100%	298.000.000									100%	278.250.000	100%	278.250.000	100%	93%
1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	298.000.000									100%	278.250.000	100%	278.250.000	100%	93%
1	Fasilitasi administratif Pemerintahan Desa	Jumlah desa terbina	11 desa	298.000.000									11 desa	278.250.000	11 desa	278.250.000	11 desa	93%

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target Renja Perangk at daerah Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemerintahan upaya trantibun	100%	11.200.000									100%	11.200.000	100%	11.200.000	100%	100%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibun	100%	11.200.000									100%	11.200.000	100%	11.200.000	100%	100%
1	Sinergitas dengan kepolisian,Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah pesonil linmas terlatih trantibun	500 org	4.000.000									500 org	4.000.000	500 org	4.000.000	500 org	100%
2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat	Jumlah fasilitasi, harmonisasi hubungan toma, toga	2 anggota forkompi nca	7.200.000									2 anggota forkompi nca	7.200.000	2 anggota forkompi nca	7.200.000	2 anggota forkompinca	100%

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target Renja Perangk at daerah Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2020						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangk at Daerah tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100%	57.200.000									100%	47.200.000	100%	47.200.000	100%	83%
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	11 desa	57.200.000									100%	47.200.000	100%	47.200.000	100%	83%
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	11 desa	7.200.000									11 desa	7.200.000	11 desa	7.200.000	11 desa	100%
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang di fasilitasi	6 kegiatan	50.000.000									6 kegiatan	40.000.000	6 kegiatan	40.000.000	6 kegiatan	80%

Tabel diatas merupakan Gambaran di tahun 2019 s/d 2020 (tahun berjalan, di tahun 2019 dan 2020 tidak ada anggaran dan capaian kinerja di karenakan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sehingga tidak bisa ditampilkan pada table diatas. program dan kegiatan diatas sudah mengacu pada Renstra PD 2018-2023 TC-27 berdasarkan nomenklatur baru berdasarkan permendagri 90 tahun 2019.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kunir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Kunir berdasarkan NSPK dan SPM maupun terhadap IKK dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.30, sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kunir
Kabupaten Lumajang

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realiasasi Capaian		Proyeksi		catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai IKM Kecamatan		80	78,60	79	79	79	84	0	88,5	88,6	Realisasi 2020 dan proyeksi 2022- 2023 memakai angka target
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti		100	87%	88,00%	91%	92%	100	0%	86%	87%	Realisasi 2020 dan proyeksi 2022- 2023 memakai angka target
	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu		71%	96,60%	96,60%	96,60%	96,60%	71%	0%	71%	86%	Realisasi 2020 dan proyeksi 2022- 2023 memakai angka target

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Menentukan batasan sasaran Kinerja yang akan diukur:
2. Menentukan kapan pelaksanaan Kinerja
3. Menentukan anggaran yang tepat agar pelaksanaan kinerja dapat berjalan dengan optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

a. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Terdapat dua isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur yang dibahas dalam bagian ini, yaitu: (a) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah, dan (b) Sinergitas Kebijakan antar wilayah.

a) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat dan relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selainya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Selain itu, tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Kualitas pertumbuhan yang memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif. Fakta tersebut dapat dilihat dengan adanya kesenjangan wilayah yang diindikasikan pada perbedaan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dimana, daerah yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo). Sedangkan daerah dengan nilai PDRB perkapita kecil berada pada Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)

b) Sinergitas Kebijakan Antar Wilayah

Perbedaan karakteristik dan potensi wilayah diantara dua wilayah yang saling berbatasan, hingga saat ini masih berpotensi memicu gejolak antar masyarakat. Di sisi lain perbedaan dalam aturan dan penerapannya juga memungkinkan munculnya permasalahan yang memungkinkan terjadinya gejolak antar wilayah. Isu strategis dari permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar Provinsi (Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, maupun Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali) maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur antara lain:

1) Disharmoni aturan, kebijakan serta penerapannya;

Fenomena ini muncul seperti adanya perbedaan penerapan aturan pada sektor Pendidikan (misalnya perbedaan aturan Sekolah di dua wilayah perbatasan), kesehatan (misalnya dalam kebersamaan Pemberantasan Wabah Penyakit), Sosial (misalnya dalam kebersamaan penanganan PMKS), Perikanan & Kelautan (misalnya kesamaan dalam penerapan aturan pemakaian Jaring di Laut)

2) Kesenjangan Sosial/ekonomi;

Kesenjangan karakteristik Sosial Ekonomi kemasyarakatan seperti pada dua wilayah yang berbeda akan semakin memperlebar disparitas antar wilayah.

3) Disorientasi Prioritas Pembangunan;

Perbedaan orirntasi pembangunan yang akan diprioritaskan berpotensi memunculkan masalah di wilayah perbatasan seperti perbedaan waktu penanganan Infrastruktur jalan yang saling berhubungan pada dua wilayah yang saling

berbatasan.

4) Eksploitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan dampaknya pada wilayah lain di luar wilayah administrasinya sendiri. Fenomena pemakaian Air Bersih dari Provinsi lain dengan perlunya juga mempertimbangkan konservasi hutan serta daya dukung lingkungan.

5) Penetapan Batas Wilayah

b. Isu Strategis Kabupaten Lumajang

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah yang terjabarkan dalam table berikut :

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Rendahnya prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan
Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana		
Belum meratanya akses kebutuhan akses dasar masyarakat dan rendahnya kualitas SDM	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan
Masih tingginya angka kemiskinan		
Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)

c. Isu strategis Kecamatan Kunir

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan visi dan misi adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah kecamatan Kunir, perumusan isu strategis Kecamatan Kunir dapat digambarkan pada table berikut :

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait pelayanan	Masyarakat belum memahami prosedur/alur pelayanan di Kecamatan	Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kunir masih belum optimal
Terbatasnya Pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan		
Belum optimalnya peran aktif masyarakat		

dalam kegiatan perencanaan / Musrenbang		
Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	
Kurangnya pemahaman aparatur Kecamatan terhadap tupoksi		
Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap tupoksi	Kurangnya jumlah desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	
Kurangnya pemahaman aparatur Desa tentang Administrasi pemerintahan desa		
kurangnya pemahaman aparatur desa tentang Peraturan perundang-undangan		

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang,

Tabel T-C 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Kunir	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	100%	1.494.728.593	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Kunir	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	100%	1.494.728.593	tidak ada perubahan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase Fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	7.260.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase Fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	7.260.000	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen perencanann	2 Dok	3.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	3.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dok	3.260.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dok	3.260.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realiasi Realisasi SKPD		Jumlah dokumen Lakip	1 Dok	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realiasi Realisasi SKPD		Jumlah dokumen Lakip	1 Dok	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kehtuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	1.300.768.593	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	1.300.768.593	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	13 Orang ASN	1.219.468.593	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	13 Orang ASN	1.219.468.593	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 Fasilitasi	54.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 Fasilitasi	54.000.000	
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	4 fasilitasi	23.300.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	4 fasilitasi	23.300.000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Akuntansi	1 dok	2.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Akuntansi	1 dok	2.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	1 dok	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	1 dok	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	100%	186.700.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	100%	186.700.000	
1	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah aktifitas surat menyurat yang difasilitasi	3 Fasilitas	91.300.000	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah aktifitas surat menyurat yang difasilitasi	3 Fasilitas	91.300.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	45.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	45.100.000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		jumlah aktivitas administrasi keuangan yang difasilitasi	4 aktifitas	23.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		jumlah aktivitas administrasi keuangan yang difasilitasi	4 aktifitas	23.000.000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		jumlah penyedia jasa kebersihan yang dibayar	2org	3.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		jumlah penyedia jasa kebersihan yang dibayar	2org	3.000.000	
5	Penyediaan ATK		Jumlah jenis ATK	24item	19.000.000	Penyediaan ATK		Jumlah jenis ATK	24item	19.000.000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	3jenis	5.300.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	3jenis	5.300.000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah jenis komponen listrik	4jenis	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah jenis komponen listrik	4jenis	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kehtuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan			100%	115.500.000	Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan			100%	115.500.000	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah jenis barang logistik	44 item	21.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah jenis barang logistik	44 item	21.800.000	
2	Penyediaan Makanan dan Minuman		jumlah penyedian makanan dan minuman	900org	14.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman		jumlah penyedian makanan dan minuman	900org	14.000.000	
3	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		jumlah perjalanan dalam daerah yang difasilitasi	320kali	40.500.000	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		jumlah perjalanan dalam daerah yang difasilitasi	320kali	40.500.000	
4			jumlah perjalanan luar daerah yang difasilitasi	20kali	4.200.000			jumlah perjalanan luar daerah yang difasilitasi	20kali	4.200.000	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah aktivitas administrasi perizinan kendaraan yang difasilitasi	8aktifitas	3.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah aktivitas administrasi perizinan kendaraan yang difasilitasi	8aktifitas	3.000.000	
6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Jumlah jenis premi non-pns difasilitasi	2jenis	32.000.000	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Jumlah jenis premi non-pns difasilitasi	2jenis	32.000.000	
5	Rehabilitasi sedang/berat mnobil jabatan		Jumlah kendaraan dinas/operasio nal yang disediakan	100%	137.000.000	Rehabilitasi sedang/berat mnobil jabatan		Jumlah kendaraan dinas/operasio nal yang disediakan	100%	137.000.000	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	8buah	39.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	8buah	39.000.000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		jumlah rumah dinas yang dipelihara	1rumah	5.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		jumlah rumah dinas yang dipelihara	1rumah	5.000.000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		jumlah gedung kantor yang dipelihara	2gedung	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		jumlah gedung kantor yang dipelihara	2gedung	50.000.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8buah	39.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8buah	39.000.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	8buah	4.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	8buah	4.000.000	
6	Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian Korpri		Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibeli Jumlah pakaian Korpri yang dibeli	100%	7.000.000	Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian Korpri		Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibeli Jumlah pakaian Korpri yang dibeli	100%	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kehtuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		jumlah pakaian khusus yang disediakan	22stel	7.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		jumlah pakaian khusus yang disediakan	22stel	7.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	60.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	60.000.000	
1	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Peresentase pemenuhan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	100%	60.000.000	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Peresentase pemenuhan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	100%	60.000.000	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan		Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	100%	2.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan		Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	100%	2.000.000	
2			Jumlah izin usaha skala kecil yang diterbitkan	100%	2.000.000			Jumlah izin usaha skala kecil yang diterbitkan	100%	2.000.000	
3			Jumlah IMB skala kecil yang diterbitkan	100%	2.000.000			Jumlah IMB skala kecil yang diterbitkan	100%	2.000.000	
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan	100%	2.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		jumlah dokumen administrasi non perizinan diterbitkan	100%	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pemenuhan upaya trantibum	100%	11.200.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pemenuhan upaya trantibum	100%	11.200.000	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	100%	11.200.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	100%	11.200.000	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		jumlah personil linmas terlatih trantibum	500 org	4.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		jumlah personil linmas terlatih trantibum	500 org	4.000.000	
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		jumlah fasilitasi, harmonisasi hubungan toma, toga	2 Anggota Forkompimca	7.200.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		jumlah fasilitasi, harmonisasi hubungan toma, toga	2 Anggota Forkompimca	7.200.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100%	57.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100%	57.200.000	

No	Rancangan Awal RKD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	57.200.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	57.200.000	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	11 desa	7.200.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	11 desa	7.200.000	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang di Fasilitasi	6 kegiatan	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang di Fasilitasi	6 kegiatan	50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isuisu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan pembangunan fisik sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Kunir. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C32

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2022

Kecamatan Kunir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	Lampu Penerangan Jalan	Sepanjang jalan kedungmoro dan Kabuaran	Menerangi jalan bagi pendatang yang lewat	2 KM, 40 lampu	Mendesak
2	Pengsemiran Jalan	Sepanjang jalan dusun sumpersari – Kunir Lor (depan SMA)	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	3000 x 3 M	Mendesak

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.4 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang telah menerbitkan dokumen RPJMD tahun 2018-2023. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut: Visi kabupaten Lumajang yaitu: “Terwujudnya masyarakat lumajang yang bermartabat, makmur dan berdaya saing”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kecamatan secara keseluruhan adalah Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan tranparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan akan dicapai oleh Kecamatan Kunir adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat

2.5 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kunir

Keberhasilan tujuan dan sasaran merupakan salah satu prioritas dalam mencapai Kinerja yang lebih baik. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan untuk tahun 2018-2023 sebagaimana penjabaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi bupati Lumajang maka tujuan yang akan di capai oleh Kecamatan Kunir sebagai berikut : Meningkatnya kepuasan masyarakat

b. Sasaran

Sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kunir tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
			2021
(1)	(2)	(3)	(5)
		Nilai IKM	88
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	78.8
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	87%
		Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	96.6%

2.6 Program dan arah kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

a. Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Kunir selama 5 tahun kedepan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Lumajang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program yang di pangku oleh Kecamatan Kunir terdapat 5 (Lima) program yang terdiri dari program rutin dan program pencapaian Kinerja bagi para pejabat Kecamatan, program yang diemban diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dari program yang di pangku ada beberapa sub kegiatan dan kegiatan yang melekat dalam program, sub kegiatan dan Kegiatan itu terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

kabupaten/Kota:

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi :

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir Tahun SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2. Penyediaan bahan logistic kantor;
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

e. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub kegiatan meliputi :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

f. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub kegiatan :

1. Pnyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;

3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta Sub Keegiatannya yaitu** : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa serta Sub Keegiatannya meliputi :**
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah serta Sub Keegiatannya yaitu** : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
5. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Sub keegiatannya yaitu** : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Untuk lebih jelasnya Penjabaran Program, Sub Kegiatan dan kegiatan dapat dilihat pada tabel TC-33 sebagai berikut :

Tabel T-C-33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keptuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional Perkantoran	Kecamatan Kunir	100%	1.494.728.593	DAU	Usulan Kecamatan	100%	1.519.568.593
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100%	7.260.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	7.460.000
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan		2 Dok	3.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	2 doK	3.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD		1 Dok	3.260.000	DAU	Usulan Kecamatan	1 doK	3.260.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realiasi Realisasi SKPD	Jumlah dokumen Lakip		1 Dok	1.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	1 doK	1.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame)/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keptuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah		100%	1.288.508.593	DAU	Usulan Kecamatan	100%	1.311.768.593
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan		13 Orang ASN	1.219.468.593	DAU	Usulan Kecamatan	13 Orang ASN	1.226.461.593
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN		2Fasilitasi	54.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	2Fasilitasi	56.000.000
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengijinan/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		4 fasilitasi	23.300.000	DAU	Usulan Kecamatan	4 fasilitasi	23.300.000
4	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi		1 Dok	2000.000	DAU	Usulan Kecamatan	1 Dok	4.000.000
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun		1 Dok	1.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	1 dok	1.000.000
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan		1 Dok	1.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	1 dok	1.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum perangkat daerah		100%	186.700.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	200.340.110

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keptuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah aktifitas surat menyurat yang difasilitasi		3 fasilitas	91.300.000	DAU	Usulan Kecamatan	3 fasilitas	100.430.000
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah reekening yang dibayar		3 Fasilitas	45.100.000	DAU	Usulan Kecamatan	3 Fasilitas	49.610.000
3	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah aktivitas administrasi keuangan yang di fasilitasi		4 Fasilitas	23.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	4 Fasilitas	23.000.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyedia jasa kebersihan yang dibayar		2 orang	3.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	2 orang	3.000.000
5	Penyediaan ATK	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan		24 item	19.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	24 item	19.000.000
6	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah jenis barang dan cetakan dan penggandaan		3 Jenis	5.300.000	DAU	Usulan Kecamatan	3 Jenis	5.300.000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik		4 jenis	2.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	4 jenis	2.000.000
4	Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			100%	115.500.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	117.500.000
1	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Jenis barang logistik		44 item	21.800.000	DAU	Usulan Kecamatan	44 item	21.800.000
2	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman		900 orang	14.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	900 orang	14.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keptuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dalam daerah yang difasilitasi		320 kali	40.500.000	DAU	Usulan Kecamatan	320 kali	42.000.000
4		Jumlah perjalanan luar daerah yang difasilitasi		20 kali	4.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	20 kali	4.700.000
5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah aktivitas administrasi perizinan kendaraan yang difasilitasi		8 aktivitas	3.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	8 Aktivitas	3.000.000
6	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah jenis premi non – pns di fasilitasi		2 jenis	32.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	2 jenis	32.000.000
5	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di sediakan		100%	137.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	137.000.000
1	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di sediakan		8 buah	39.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	8 buah	39.000.000
2	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah yang dipelihara		1 rumah	5.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	1 rumah	5.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		2 gedung	50.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	2 gedung	50.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara		8 buah	39.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	8 buah	39.000.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame)/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keptuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		8 buah	4.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	8 buah	4.000.000
6	Pengadaan Pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapanagn yang dibeli		100%	7.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	7.000.000
1	Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan		22 stel	7.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	22 stel	7.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%	60.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	65.000.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan		100%	60.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	60.000.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	jumlah rekomendasi izin yang ditertibkan		100%	2.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	2.200.000
2		Jumlah izin usaha skala kecil yang ditertibkan		100%	2.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	2.200.000
3		Jumlah IMB skala kecil yang ditertibkan		100%	2.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	2.200.000
4	Pelaksanaan urusan pemerintahan yangterkait	Jumlah dokumen administrasi non		100%	2.000.000	DAu	Usulan Kecamatan	100%	2.200.000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcame)/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keptuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum		100%	11.200.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	11.200.000
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibun		100%	11.200.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	11.200.000
1	Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertical di wilayah Kecamatan	jumlah personil linmas terlatih trantibun		500 org	4.000.000	DAU	Usulan Kecamatan	500 org	4.000.000
2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tomas	Jumlah fasilitasi,harmonisasi hubungan toma,toga		2 anggota forkompinca	7.200.000	DAU	Usulan Kecamatan	2 anggota forkopimca	7.200.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi		100%	278.250.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	298.000.000
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa		100%	278.250.000	DAU	Usulan Kecamatan	100%	298.000.000
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa		11 Desa	278.250.000	DAU	Usulan Kecamatan	11 Desa	278.250.000

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Kunir merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kunir. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh Kecamatan Kunir kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Kunir. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kunir.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang, berikut penjabaran rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kunir.

Tabel 4.1
Rencan Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kunir
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu indikatif
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	100%	1.621.291.171
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	3.326.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dok	2.545.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realiasi Realisasi SKPD	Jumlah dokumen Lakip	1 Dok	781.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	1.240.523.393
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	13 Orang ASN	1.217.468.593
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	20.026.800
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD	1 Dok	1.740.000
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah jenis Laporan	1 Dok	644.000

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun		
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan Keuangan	1 Dok	644.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi BMD perangkat daerah	100%	1.600.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Fasilitasi penatatusahaan BMD	567 barang	1.600.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi umum SKPD	100%	111.107.110
	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang di sediakan	2 Jenis	2.046.800
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah jenis bahan logistic kantor	44 jenis	18.846.510
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen Jumlah jenis barang cetakan yang di sediakan	14059 lembar 2 jenis	6.126.300
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi SKPD	930 org	84.087.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	188.076.168
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	63.900.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang di bayar	3 Rekening	59.856.168
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	64.320.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100%	76.658.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Jenis	2.116.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	10 Jenis	49.050.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	2 Gedung	25.492.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	41.700.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis kewenangan lain yang dilimpahkan	6 Dok	41.700.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100%	49.538.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Unsur Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang	125 Org	7.230.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan pemberdayaan Masyarakat	8 Kali	42.308.000

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100%	7.200.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	12 Bulan	7.200.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100%	278.190.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	11 Desa	278.190.000
Jumlah Anggaran				1.997.919.171

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Kunir Tahun 2018- 2023.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Kecamatan Kunir.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Kecamatan Kunir :

1. Masyarakat belum memahami prosedur/alur pelayanan di Kecamatan dikarenakan , Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait pelayanan, Terbatasnya Pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan dan Tidak ada media Publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan Kunir.
2. Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait dikarenakan Kurangnya pemahaman aparatur Kecamatan terhadap tupoksi dan kurangnya pemahaman aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang- undangan
3. Kurangnya jumlah desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu dikarenakan, Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap tupoksi, Kurangnya pemahaman aparatur Desa tentang Administrasi pemerintahan desa, dan kurangnya pemahaman aparatur desa tentang Peraturan perundang- undangan.

Kunir, Januari 2021
Camat Kunir



SUDHO HARIYANTO, AP.MT
NIP. 19750121 199412 1 001

